UNIT PELAKSANA TEKNIS HUMAS

UNIVERSITAS DIPONEGORO

KLIPING

Klasifikasi : Universitas Diponegoro

Tema : Kemenlu- FH Undip Sosialisasi HAM

Surat Kabar / Majalah : Suara Merdeka

Hari **Jumat** , Tanggal **12**, Bulan **Maret** , Tahun **2010**, Halaman **D** Kolom --

Ringkasan :

Kementrian Luar Negeri dan Fakultas Hukum Undip bekerjasama menyelenggarakan sosialisasi tentang pembentukan Badan HAM ASEAN di selenggarakan di Gedung Notariat Undip Pleburan.

Catatan :

SM/Yunantyo Adi S

***SOSIALISASI HAM:** Dosen FH Undip Rahayu dan Dr Ben Pekasa Drajat dari Direktorat Kerjasama Fungsional Kemenlu pada sosialisasi HAM di Undip, kemarin. (87)*

Kemenlu-FH Undip Sosialisasi HAM

SEMARANG SELATAN-Direktorat Jendral ASEAN Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Fakultas Hukum (FH) Undip menyelenggarakan sosialisasi tentang pembentukan Badan HAM ASEAN. Sosialisasi diselenggarakan di Gedung Notariat Undip Pleburan, Kamis (11/3).

Hadir sebagai pembicara dosen Hukum Internasional Undip, Rahayu SH MHum, Plt Direktur Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN-Kemenlu, Ade Padmo Sarwono, Dr Ben Pekasa Drajat dari Direktorat Kerja Sama Fungsional ASEAN-Kemenlu, dan Tri Purnijaya dari Direktorat Kerjasama Ekonomi ASEAN Deplu.

Ade Padmo mengutarakan, sosialisasi itu diselenggarakan kaitannya upaya mencapai Komunitas ASEAN 2010.

Ada tiga bidang yang menjadi fokus komunitas, yakni bidang politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Sasaran utama sosialisasi saat ini adalah kalangan perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

"Intinya, yang ingin dikembangkan adalah peran serta masyarakat, sebab sejauh ini baru pemerintah saja yang proaktif di ASEAN. Seluruh lapisan diharapkan sudah memiliki pengetahuan dan nantinya memanfaatkan Komunitas ASEAN ini," katanya.

Rahayu dalam kesempatan itu memaparkan, ditandatanganinya Piagam ASEAN di Singapura pada 2007, menandai era baru ASEAN sebagai organisasi internasional regional di kawasan Asia Tenggara.

Secara substansial, ASEAN Chapter memberi kerangka hukum dan kelembagaan bagi 10 negara anggotanya dalam rangka membangun kerjasama, sebab piagam itu menjadi tahapan awal dari proses institusionaliasi ASEAN.

Piagam ASEAN ini, kata dia, dianggap meniupkan angin baru proses demokratisasi dan HAM di kawasan. Kepedulian ASEAN terhadap HAM dinilainya sebagai langkah besar, sebab sebelumnya sama sekali tak pernah dimasukkan sebagai unsur regionalisme di ASEAN secara terbuka. (H30-87)